

**ANALISIS KESIAPAN BPP DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM
KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN
(KOSTRATANI)**

*(Studi Kasus UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan)*

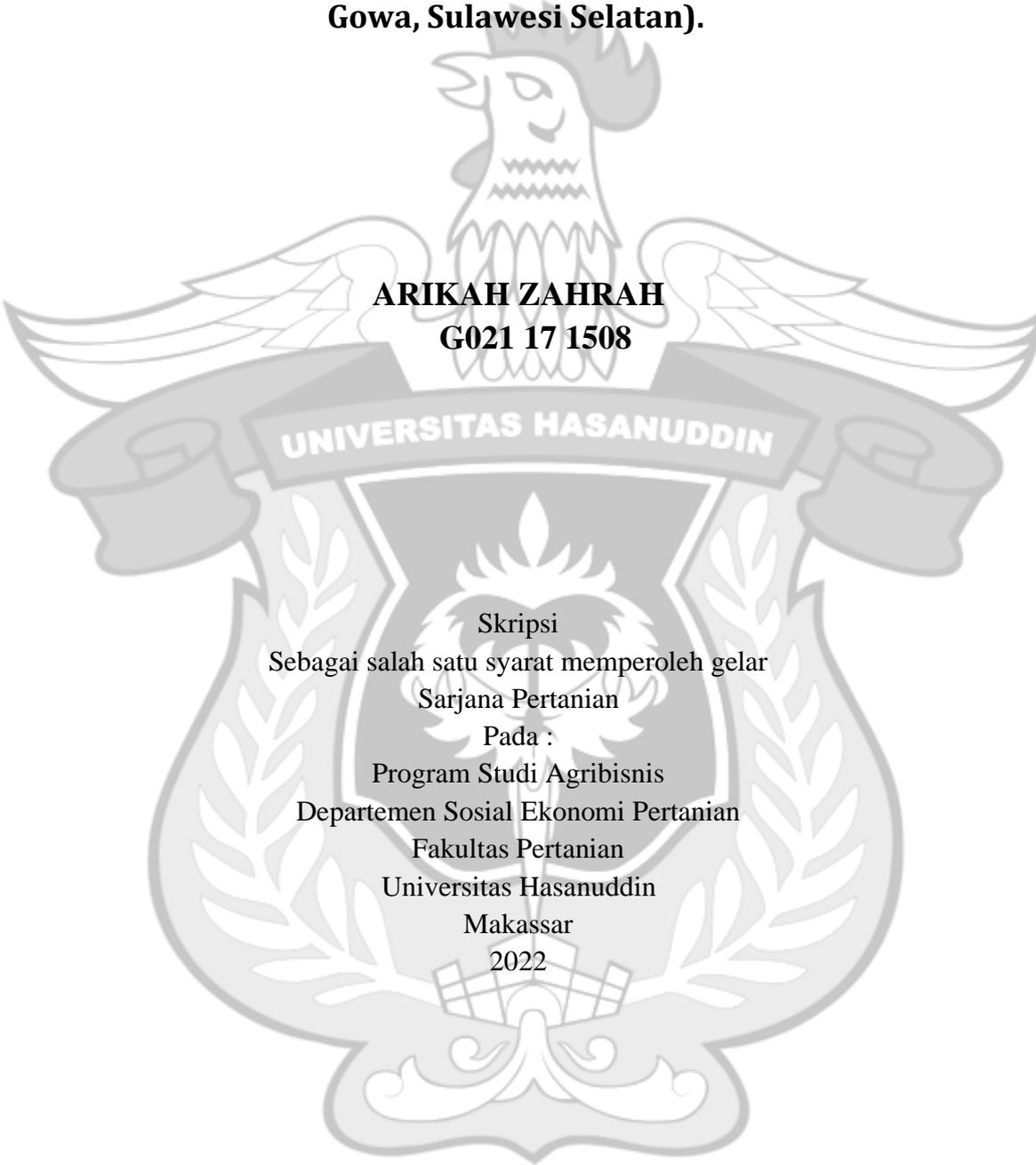
**OLEH: ARIKAH ZAHRAH
G 021 171 508**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**ANALISIS KESIAPAN BPP DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM
KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN (KOSTRATANI)
(Studi Kasus UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten
Gowa, Sulawesi Selatan).**

**ARIKAH ZAHRAH
G021 17 1508**



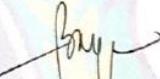
Skripsi
Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pertanian
Pada :
Program Studi Agribisnis
Departemen Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar
2022

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

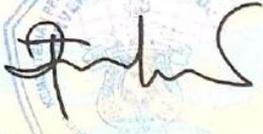
Judul Skripsi : Analisa Kesiapan BPP Dalam Mewujudkan Program Komando Strategis
Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI).
(Studi Kasus UPT BPP Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi
Selatan).
Nama : Arikah Zahrah
NIM : G021171508

Disetujui oleh:


Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si.
Ketua


Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si.
Anggota

Diketahui oleh:


Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si
Ketua Departemen

Tanggal Lulus : 31 Maret 2022

**PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

JUDUL : Analisis Kesiapan BPP Dalam Mewujudkan Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) (Studi Kasus UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan).

NAMA MAHASISWA : ARIKAH ZAHRAH

NOMOR POKOK : G021 17 1508

SUSUNAN TIM PENGUJI

**Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si.
Ketua Sidang**

**Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si.
Anggota**

**Ir. Nurdin Lanuhu, M.P.
Anggota**

**Dr. Ir. Hatta Jamil, S.P.,M.Si.
Anggota**

Tanggal Ujian: 31 Maret 2022

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Kesiapan BPP Dalam Mewujudkan Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) (Studi Kasus UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan)" benar adalah karya saya dengan arahan tim pembimbing, belum pernah diajukan atau tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Saya menyatakan sumber informasi yang digunakan telah disebutkan di dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Makassar, 31 Maret 2022



Arikah Zahrah
G021171508

ABSTRAK

ARIKAH ZAHRAH, Analisis Kesiapan BPP Dalam Mewujudkan Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) (Studi Kasus UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan). Pembimbing: TAMZIL IBRAHIM dan NURBAYA BUSTHANUL.

Latar Belakang Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) di BPP merupakan pusat gerakan yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi, sinergi, dan penyelarasan kegiatan pembangunan pertanian di Kecamatan. **Tujuan** penelitian ini menganalisis kesiapan dan mendeskripsikan upaya-upaya BPP dalam mewujudkan program KOSTRATANI. **Metode** penelitian adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif). **Hasil** penelitian menunjukkan kevalidan instrumen pada uji reabilitas yang menunjukkan setiap variabel dikatakan reliabel (handal) karena jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dan penerapan sistem kerja LAKU dapat meningkatkan motivasi penyuluh pertanian dalam melaksanakan fungsinya sebagai pendamping dan pembimbing petani, serta menjamin kesinambungan pembinaan penyuluh kepada petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani yang lebih baik di Desa Sungguhminasa, Kecamatan Pattalassang sebagai bentuk pengembangan bibit bawang merah yang kemudian akan disebar kebeberapa petani di Malino. Kegiatan pelaksanaan sasaran areal luas tanam komoditi utama tanaman pangan yaitu tanaman padi dan jagung sebagai langkah mewujudkan Program Kostratani dengan membuat laporan mingguan realisasi. **Kesimpulan** penelitian bahwa kesiapan lembaga memiliki tingkat siap, kesiapan sumberdaya manusia memiliki tingkat siap, kesiapan informasi memiliki tingkat siap, kesiapan infrastruktur teknologi informasi memiliki tingkat siap, dan kesiapan lingkungan eksternal memiliki tingkat siap dan mewujudkan program kostratani di UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan telah melaksanakan sistem kerja latihan dan kunjungan, pelaksanaan dem-plot, dem-farm area, dem unit, dan menetapkan sasaran areal luas tanam komoditas utama tanaman pangan serta banyak kegiatan lainnya yang tidak bisa peneliti deskripsikan semuanya.

Kata Kunci : Penyuluh Pertanian, Program, KOSTRATANI.

ABSTRACT

ARIKAH ZAHRAH, *Analysis of BPP Readiness in Realizing the Strategic Command Program for Agricultural Development (KOSTRATANI) (Case Study of UPT BPP Agriculture in Bonto Bonto Region, Gowa Regency, South Sulawesi)*. Supervisor: TAMZIL IBRAHIM and NURBAYA BUSTHANUL.

Background The Strategic Command for Agricultural Development (KOSTRATANI) at BPP is the center of the movement that will determine the success of agricultural development through coordination, synergy, and harmonization of agricultural development activities in the sub-districts. **Purpose** of this study is to analyze readiness and describe BPP's efforts in realizing the KOSTRATANI program. **Methods** is descriptive quantitative and qualitative . **Results** showed the validity of the instrument in the reliability test which showed that each variable was said to be reliable (reliable) because the respondents' answers to the questions were consistent or stable and the application of the LAKU work system could increase the motivation of agricultural instructors in carrying out their functions as assistants and mentors to farmers, as well as ensure the continuity of extension development to farmers. farmers in carrying out better farming activities in Reallyminasa Village, Pattalassang District as a form of developing shallot seeds which will then be distributed to several farmers in Malino. The activity of implementing the target area for planting the main commodity of food crops, namely rice and corn as a step to realize the Kostratani Program by making a weekly report on the realization. **Conclusion** of the research is that the readiness of the institution has a ready level, the readiness of human resources has a ready level, information readiness has a ready level, the readiness of information technology infrastructure has a ready level, and the readiness of the external environment has a ready level and realizes the boarding program at UPT BPP Agriculture Bonto Bonto Region, Regency Gowa, South Sulawesi has implemented a work system of training and visits, implementing demonstration plots, dem-farm areas, dem units, and setting a target area for planting the main food crop commodities as well as many other activities that the researcher cannot describe all of them.

Keywords: Agricultural Extension, Programs , KOSTRATANI.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Arikah Zahrah, lahir di Nunukan, pada tanggal 14 Juni 1999 merupakan anak pertama dari pasangan **Muhammad Sabri** dan **Asni Sumaryati** dari empat orang bersaudara yaitu **Tsabita Salsabila Sabri, Atiqah Nuzul Ramadhani, dan Muhammad Zahran Zhabir**. Selama hidupnya, penulis telah menempuh beberapa pendidikan formal, yaitu:

1. SD Islam Terpadu Ibnu Sina Nunukan Tahun 2005-2011
2. SMP Islam Terpadu Ibnu Sina Nunukan Tahun 2011-2014
3. SMA Bosowa School Makassar Tahun 2014-2017
4. Selanjutnya dinyatakan lulus melalui Seleksi Jalur Non Subsidi menjadi mahasiswa di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2017 untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1).

Selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin, penulis bergabung dalam kegiatan organisasi dalam lingkup Departemen Sosial Ekonomi Pertanian sebagai Staf Bendahara Badan Pengurus Harian (BPH) Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian MISEKTA periode 2019/2020. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti seminar-seminar mulai dari tingkat regional, nasional hingga tingkat internasional.

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul:

“ANALISIS KESIAPAN BPP DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN (KOSTRATANI) (Studi Kasus UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan) ”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dalam studi jenjang strata satu (S1) di Program Studi Agribisnis, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membutuhkan peran serta dari pihak lain dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing saya bapak **Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si.** dan ibu **Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si.** yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Diluar itu, penulis sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi tata bahasa, susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, saya selaku penyusun menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 31 Maret 2022

Penulis

PERSANTUNAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbilalamiin, segala puji hanya milik Allah SWT. Berkat rahmat dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha penulis sendiri, melainkan bantuan tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Ayah tercinta **H. Muhammad Sabri** dan Ibu tercinta **Hj. Asni Sumaryati** yang telah membesarkan penulis dengan kasih sayang yang tak terhingga dan doa yang terus terpanjatkan untuk keberhasilan penulis dalam meraih cita-cita. Tanpa sosok orang tua penulis tidak bisa mencapai impian ini. Untuk adik saya terkasih **Tsabita Salsabila Sabri, Atiqah Nuzul Ramadhani** dan **Muhammad Zahrah Zhabir** yang senantiasa menjadi penolong, menguatkan, sabar dan selalu menyemangati dan memberi dukungan untuk penuliss.
2. Bapak **Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si.** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si.** selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
3. Bapak **Ir. Nurdin Lanuhu, M.P.** dan Bapak **Dr. Ir. Hatta Jamil, S.P., M.Si** selaku penguji yang telah memberikan kritik serta saran guna perbaikan penyusunan tugas

akhir ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan tingkah laku yang kurang berkenan selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu **Ni Made Viantika S, S.P., M.Agb.** selaku panitia seminar proposal terimakasih telah memberikan waktunya untuk mengatur seminar serta petunjuk dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Terima kasih juga sudah selalu memberikan waktunya untuk penulis ketika menanyakan mengenai hal-hal yang kurang atau bahkan tidak penulis pahami.
5. Ibu **Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si.**, dan Bapak **Ir. Rusli M. Rukka, M.Si.**, selaku Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Sosial Ekonomi Pertanian yang telah banyak memberikan pengetahuan, mengayomi, dan memberikan teladan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Bapak dan ibu dosen, khususnya Program Studi Agribisnis Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.
7. Seluruh staf dan pegawai Departemen Sosial Ekonomi Pertanian terkhusus **Pak Rusli, Kak Ima, dan Kak Hera** yang telah membantu penulis dalam proses administrasi untuk penyelesaian tugas akhir ini.
8. Kepada **Ibu Nuhayati S.P, Ibu Halimah S.P, Ibu Jumiati, Bapak Muh Amir S.P di UPT BPP Wilayah Bonto Bonto** yang telah bersedia dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu serta mengarahkan penulis selama penelitian.
9. Kepada **Penyuluh Pertanian UPT BPP Wilayah Bonto Bonto** beserta jajarannya, terima kasih telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
10. Keluarga besar **Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian (MISEKTA)**, MISEKTaku, wadah komunikasiku, curahan bakat minatku, tuntunan masa depanku,

terima kasih banyak atas semua dinamika, pengetahuan dan pengalaman organisasi yang telah diberikan kepada penulis.

11. Untuk **Keluarga Besar Mahasiswa Agribisnis Angkatan 2017 (AFIN17AS)**, terima kasih telah menjadi keluarga baru sejak tahun 2017 sampai sekarang, terima kasih atas cerita, pengalaman, tawa, tangis selama perkuliahan ini serta segala bantuannya selama 4 tahun lebih, segala suka duka yang kita alami, bersama, segala kebersamaan yang telah kita lewati.
12. Untuk sahabat-sahabatku dan seperjuanganku selama 4 tahun ini **Akbar Jading dan Riska Asri Ainun** terima kasih telah menjadi saudara yang selalu mendukung, memotivasi, menyemangati, menemani, mendoakan serta mendengar semua keluhan penulis selama menyelesaikan skripsi ini, kalian takkan pernah terlupa dan terganti.
13. Untuk **Aswar Basrah**, terima kasih selalu menemani, memberikan segala semangat, doa dukungan dan menjadi pendengar yang baik dalam keseharian yang telah diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
14. Untuk **Gadis Puspasari, Alifah Zhafirah, Indriyani Arman** terima kasih telah memberikan selalu motivasi, memberikan semangat, menanyakan kabar penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sosok perhatian untuk penulis, walaupun jarang bertemu tetapi senantiasa menjalin komunikasi yang baik.
15. Untuk **Kak Ibrahim Al – Affan, Riska Maulina Muchsen, Husna Quila Qariska, Rio Akbar Rahmatullah, dan Hasanannisa** terima kasih telah menjadi yang selalu merespon segala pertanyaan penulis dan memberikan masukan yang baik dalam penyusunan skripsi ini. Untuk **teman-teman** lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua cerita baru serta pengalaman berkesan yang

diperoleh selama menyusun skripsi. Semua cerita dan pengalaman merupakan hiburan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.

16. **Kepada semua pihak** terima kasih sebesar-besarnya telah memberi bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Demikianlah, untuk semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak, Amin.

Makassar, 31 Maret 2022

Daftar Isi

Daftar Isi.....	xvii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar.....	xvii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Penelitian	3
1.3.2 Manfaat Penelitian	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Kostratani.....	4
2.2 Kelembagaan BPP	5
2.2.1 Pengertian Kelembagaan.....	5
2.2.2 Tugas BPP (Balai Penyuluhan Pertanian).....	6
2.2.3 Upaya Penguatan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)	6
2.2.4 Indikator Keberhasilan Fasilitator BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)	6
2.3 Penyuluhan Pertanian	7
2.3.1 Peranan Penyuluhan Pertanian.....	7
2.3.2 Metode Penyuluhan Pertanian	8
2.3.3 Jenis-jenis Metode Penyuluhan.....	8
2.4 Kesiapan Implementasi Program Kostratani (<i>E-Readiness</i>).....	9
2.5 Agriculture War Room	12
2.6 Kerangka Pemikiran	13
3. METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	15
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	15
3.3 Penentuan Informan.....	15
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.5 Metode Analisis Data.....	32
4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
4.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah	34
4.2 Kependudukan	34
4.3 Sarana dan Prasarana	34

5.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
5.1	Identitas Informan.....	36
5.1.1	Umur	36
5.1.2	Tingkat Pendidikan	37
5.1.3	Jumlah Tanggungan Keluarga	37
5.1.4	Identitas Informan Kunci	38
5.2	Analisis Kesiapan BPP dalam rangka mewujudkan Program KOSTRATANI (<i>E-Readiness</i>).....	38
5.2.1	Instrumen Penelitian	38
5.2.1.1	Uji Validitas.....	38
5.2.1.2	Uji Realibilitas	39
5.2.2	Kesiapan Lembaga.....	40
5.2.3	Kesiapan Sumber Daya Manusia	42
5.2.4	Kesiapan Informasi	44
5.2.5	Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi.....	46
5.2.6	Kesiapan Lingkungan Eksternal	47
5.3	Upaya yang dilakukan BPP dalam rangka mewujudkan program KOSTRATANI	49
5.3.1	Melaksanakan Sistem Kerja Latihan Dan Kunjungan	49
5.3.2	Pelaksanaan Dem-Plot, Dem-Farm Area, Dem Unit	51
5.3.3	Menetapkan Sasaran Areal Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Pangan.....	52
6.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
6.1	Kesimpulan	55
6.2	Saran	55
	Daftar Pustaka	56

Daftar Tabel

Tabel 3-1 Kriteria Kesiapan Lembaga	17
Tabel 3-2 Kriteria Kesiapan SDM.....	21
Tabel 3-3 Kriteria Kesiapan Informasi.....	23
Tabel 3-4 Kriteria Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi	27
Tabel 3-5 Kriteria Kesiapan Lingkungan Eksternal.....	30
Tabel 3- 6 Range Score E-Readiness	33
Tabel 4-1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Bontomarranu.....	34
Tabel 4-2 Sarana dan Prasarana	35
Tabel 5-1 Identitas Informan Berdasarkan Kelompok Umur di UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto.....	36
Tabel 5-2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto.....	37
Tabel 5-3 Identitas Informan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga Di UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto	37
Tabel 5-4 Identitas Informan Kunci UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.....	38
Tabel 5-5 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian.....	39
Tabel 5-6 Hasil Uji Realibilitas Variabel Penelitian.....	40
Tabel 5-7 Kesiapan Lembaga.....	40
Tabel 5-8 Tingkat Kesiapan BPP Dalam Kesiapan Lembaga Terhadap Program Kostratani di UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2021	41
Tabel 5-9 Kesiapan Sumber Daya Manusia.....	43
Tabel 5-10 Tingkat Kesiapan Sumber Daya Manusia di BPP Terhadap Program Kostratani di UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2021	43
Tabel 5-11 Kesiapan Informasi	44
Tabel 5-12 Tingkat Kesiapan Informasi di BPP Program Kostratani di UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2021	45
Tabel 5-13 Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi	46
Tabel 5-14 Tingkat Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi di BPP Terhadap Program Kostratani di UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2021	47
Tabel 5-15 Kesiapan Lingkungan Eksternal	48
Tabel 5-16 Tingkat Kesiapan Lingkungan Eksternal BPP Terhadap Program Kostratani di UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2021	48

Tabel 5-17 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Tanaman Pangan (Padi Dan Jagung) di Kecamatan Bontomarannu UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2021.....	53
Tabel 5-18 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Tanaman Pangan (Padi Dan Jagung) di Kecamatan Pattalasang UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2021.....	53
Tabel 5-19 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Tanaman Pangan (Padi Dan Jagung) di Kecamatan Sombaopu UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2021.....	54

Daftar Gambar

Gambar 1-1 Model Penilaian E-Readiness Mutula dan Brakel	12
Gambar 1-2 Skema Kerangka Pemikiran Analisis Kesiapan BPP Dalam Mewujudkan Program Komando Strategis Pertanian (Kostratani) Studi Kasus UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan	14

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pengertian pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi dengan berdasarkan pada terjadinya proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Pengertian pertanian dapat dalam arti yang sempit atau dalam arti yang luas. Pertanian dalam arti yang sempit diartikan sebagai pertanian rakyat, sedangkan dalam arti yang luas pertanian mencakup pertanian, kehutanan, peternakan, atau perikanan sebagai usaha bidang pertanian. Semua pengelolaan tumbuh-tumbuhan atau tanaman dan lingkungannya agar dihasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan disepakati sebagai pengertian pertanian secara terbatas. Dengan demikian dunia pertanian hanya mencakup tumbuh-tumbuhan dan lingkungannya. Sedangkan dalam arti luas, pertanian diartikan sebagai pengelolaan tumbuh-tumbuhan, ternak, dan ikan agar menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Produk dimaksud misalnya berupa padi, jagung, kedelai, buah-buahan, dan sebagainya sebagai hasil pertanian dengan objek tumbuh-tumbuhan. Daging dan susu sebagai hasil atau pertanian dengan objek hewan ternak dan berbagai jenis ikan tawar seperti bawal, lele, nila, gurame, dan lain-lain sebagai hasil atau pertanian dengan objek perikanan.

Presiden RI mengamanatkan bahwa Menteri Pertanian diminta mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan amanat Presiden tersebut, Menteri Pertanian menjabarkan ke dalam program strategis yaitu dengan membangun satu data pertanian dalam satu sistem Big Data serta penguatan penyuluhan pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan. Data merupakan kekuatan utama dalam membangun ketahanan pangan kedepan, sehingga kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor pertanian harus didasarkan pada data dan informasi lapangan yang akurat.

Untuk memantapkan data pertanian tunggal (SATU DATA), Kementerian Pertanian melaksanakan verifikasi ulang dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Data pertanian akan dibangun dalam satu sistem Big Data dan disajikan secara komprehensif oleh Kementerian Pertanian melalui Agriculture War Room (AWR) sebagai pusat Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Sistem data dipersiapkan untuk dapat memonitor kegiatan pembangunan pertanian secara real time dengan basis data yang handal dan akurat. Jabaran visi tersebut seperti pada Gambar 1.

Sesuai kebijakan Menteri Pertanian, operasionalisasi pembangunan pertanian berada pada tingkat lapangan, dimana unit kerja non struktural pertanian terendah adalah BPP dimana keberadaanya sampai pada tahun 2018 berjumlah 5.640 unit dan Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak dan garda terdepan ketahanan pangan nasional sampai pada tahun 2018 terdiri atas 31.506 orang Penyuluh Pertanian ASN, 12.135 orang THLTB-PP dan Penyuluh Swadaya sebanyak 25.852 orang.

Harapan untuk menjadikan Indonesia maju dan mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat dapat terwujud, salah satunya dengan menggerakkan penyuluh pertanian yang didukung oleh petugas pertanian lainnya di tingkat kecamatan dan desa.

BPP sebagai pusat gerakan dan layanan pembangunan pertanian di Kecamatan, perlu dilakukan optimalisasi tugas, fungsi dan perannya, melalui penguatan data dan informasi dengan sistem berbasis IT sehingga dapat dikendalikan dengan baik oleh Kementerian

Pertanian. Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) di BPP merupakan pusat gerakan yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi, sinergi, dan penyelarasan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan.

Terkait dengan hal tersebut, secara teknis para penyuluh pertanian di BPP akan diperkuat dengan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi, menggali, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pertanian. Data dan Informasi disajikan melalui media digital yang mampu menggambarkan kondisi lapangan seperti memprediksi kapan waktu panen, posisi standing crop, serangan hama penyakit dan cara pengendaliannya, teknologi budidaya, peluang dan informasi dinamika pasar dalam dan luar negeri, sampai dengan informasi pergerakan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019, BPP merupakan lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas, fungsi dan peran dalam: (a) menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota; (b) melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian; (c) menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; (d) mengembangkan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; (e) meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian Pemerintah, Swadaya, dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; (f) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; (g) menumbuhkembangkan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes); dan (h) mengembangkan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Untuk itu, BPP sebagai KOSTRATANI harus didukung dengan kelembagaan yang solid, ketenagaan yang profesional, dan penyelenggaraan fungsi penyuluhan yang berbasis IT dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas berusaha tani sehingga produksi usaha pertanian mampu meningkatkan produktivitas, produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Kesiapan BPP dalam mewujudkan Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) (Studi Kasus BPP Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesiapan BPP dalam rangka mewujudkan program KOSTRATANI di Lokasi penelitian?
2. Bagaimana Upaya kesiapan BPP dalam mewujudkan program KOSTRATANI di Lokasi penelitian?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis kesiapan BPP dalam mewujudkan program KOSTRATANI.
2. Mendeskripsikan upaya-upaya BPP dalam rangka mewujudkan KOSTRATANI.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adaah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya penyuluh pertanian untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mewujudkan keberhasilan program Kostratani di masing – masing BPP tingkat Kecamatan.
2. Untuk memberi input kepada pihak pemerintah dan swasta untuk mengoptimalkan tugas fungsi dan peran BPP sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat Kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
3. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka menyusun tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin.
4. Menjadi referensi untuk peneliti lainnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kostratani

Dibawah komando Syahrul Yasin Limpo, Kementerian Pertanian mencanangkan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan (Kostratani) sebagai gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi. Kementerian dengan motto Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern ini menggulirkan Kostratan untuk menjamin terwujudnya sinergi dan kesatuan gerak pembangunan pertanian di setiap lini. Dengan demikian, gerak pembangunan pertanian pada setiap tingkatan pemerintahan dapat berlangsung harmonis. Perkembangan di lapangan dapat dimonitor dan diarahkan pusat melalui Agriculture War Room (AWR).

Sebagai ujung tombak di tingkat lapangan diperankan oleh Kostratani yang berkedudukan di kecamatan. Melalui Kostratani, pemerintah mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Sarana dan prasarananya juga ditingkatkan. Kapasitas penyuluh dan kelembagaan penyuluhan serta, kelembagaan petani ditingkatkan dan diperkuat.

Sebagai sebuah gerakan pembaharuan Kostratan dibuat berjenjang. Di tingkat pusat ada Komando Strategis Pembangunan Pertanian Nasional (Kostranas), kemudian di tingkat provinsi terdapat Komando Strategis Pembangunan Pertanian Wilayah (Kostrawil), di Kabupaten berupa Komando Strategis Pembangunan Pertanian Daerah (Kostrada) dan di kecamatan ada Kostratani.

Karena pembangunan pertanian nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, maka masing-masing pimpinan daerah menjadi penanggungjawab program dalam memacu produksi, produktivitas dan gerakan pertanian di wilayah kerja masing-masing. Kostratani komandannya adalah Camat, Kostrada adalah Bupati/Walikota, Kostrawil adalah Gubernur dan di tingkat nasional diarahkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Di tingkat nasional, Menteri Pertanian memainkan peranannya memantau dan mengendalikan semua kegiatan pembangunan pertanian di daerah melalui perangkat digital dari daerah yang tersambung dengan AWR. AWR menjadi jembatan informasi bagi pengambil kebijakan dengan petani dan penyuluh di lapangan. Selain itu, AWR juga menjadi pusat kendali dan pemantauan secara real time kondisi pertanaman dan potensi pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

Program AWR sebagai pusat data dan sistem kelola pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi dengan pencitraan satelit dan artificial intelligence (AI). Teknologi ini menjadi alat ukur dalam melakukan pengawasan sekaligus pemetaan lahan pertanian.

Sumber data AWR berasal dari internal dan eksternal meliputi data alat dan mesin pertanian (alsintan), lahan citra satelit, harga komoditas, profil petani dan penyuluh, capaian kegiatan/program, pengaduan dan kepuasan, data sosial media, dan data survei. Dalam pergerakannya, Kostratani mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran BPP dengan menyelaraskan kemajuan era industrialisasi 4.0. Kostratani berpusat di Kecamatan, karena pembangunan pertanian dilakukan dari lapangan (desa hingga kecamatan). Kostratani memainkan lima peran strategis yaitu, sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, pusat

pengembangan jejaring kemitraan. Sebagai pusat data dan informasi bagi masyarakat, BPP Kostratani dapat memberikan informasi tentang potensi wilayah, teknologi pertanian juga informasi pasar. Kostratani sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian, melaksanakan kegiatan unggulan Kementerian Pertanian seperti Propaktani, Gedor Horti, Gratiexs, Korporasi Petani dan lain sebagainya. Sasarannya adalah kelompok tani, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani, Petani Millenial dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

Sebagai pusat pembelajaran, BPP Kostratani diperuntukkan bagi penyuluh, petani dan Gapoktan hingga KWT dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan sumber daya manusia pertanian. Sebagai pusat konsultasi agribisnis, BPP Kostratani dapat berperan sebagai sekretariat konsultasi agribisnis untuk petani hingga swasta untuk meningkatkan usaha pertanian menjadi skala bisnis.

Begitu juga peranan BPP Kostratani sebagai pusat pengembangan jejaring kerjasama. Brigade Kostratani akan memberikan akses dan informasi, sehingga bisa terbentuk kerjasama dalam bidang pertanian. Mulai dari akses permodalan hingga kerjasama bisnis lainnya yang tentu membutuhkan jejaring kerjasama agar semakin berkembang dalam skala bisnis. Tak hanya memantau, pimpinan daerah diharapkan membantu pelaku pertanian di perdesaan seperti penyuluh pertanian, pejabat fungsional lainnya, petani, dan pelaku usaha pertanian untuk berperan aktif dalam pembangunan pertanian. Selain itu, pemimpin daerah diharapkan dapat membantu mengaktifkan peran pemimpin nonformal seperti KTNA, kelembagaan petani, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memotivasi insan pertanian agar berproduksi menuju swasembada pangan berkelanjutan. Tak kalah pentingnya, Kostratani juga berperan peningkatan sinergitas pelaku dan program pertanian dengan Kementerian dan Lembaga lainnya. Serta, peningkatan jejaring kerja Kostratani dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta di daerah.

2.2 Kelembagaan BPP

2.2.1 Pengertian Kelembagaan

Tony Djogo (2003) ada berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan oleh ahli dari berbagai bidang. Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) Lembaga oleh berbagai bidang. Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Sedangkan menurut Ostrom, (1985-1986) kelembagaan diidentikan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institusional arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa unsur-unsur aturan operasional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Dari definisi para ahli tersebut Djogo Dkk, menyimpulkan dan mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atauran formal maupun informal

untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

2.2.2 Tugas BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)

Tugas Balai Penyuluhan Pertanian adalah:

1. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota;
2. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Swadaya, Swasta) melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui unit percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

2.2.3 Upaya Penguatan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)

Upaya penguatan dalam rangka pelaksanaan tugas BPP antara lain:

1. BPP sebagai pusat data dan informasi (SIMLUH, Siluhtan, E-VALUH, dll) : pemenuhan fasilitas brainware, software, dan hardware.
2. Peningkatan kapasitas SDM (penyuluh, petugas dan petani) melalui pelatihan, magang, lokakarya, temu teknis, studi banding, cyber extension, dan percontohan oleh lembaga Pemerintah dan Swasta.
3. BPP sebagai pusat koordinasi program pembangunan pertanian: BPTP, Instansi Teknis, Kantor Kecamatan
4. BPP sebagai pusat pengembangan kemitraan: Perbankan, Pasar, Bulog, dan perusahaan agribisnis.
5. BPP memenuhi target penumbuh- kembangan kelembagaan ekonomi petani (KEP/Korporasi) 1 KEP 1 WKBPP: melakukan pendampingan.

2.2.4 Indikator Keberhasilan Fasilitator BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)

Indikator keberhasilan fasilitasi BPP adalah:

1. Peningkatan kelas klasifikasi BPP
2. Penambahan jumlah PP swadaya dan PP Swasta
3. Dihasilkan matrik perencanaan pendampingan penyuluhan tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan melalui rembug tani
4. Peningkatan kelas kemampuan kelembagaan petani
5. Peningkatan produksi dari target yang ditetapkan oleh masing-masing penyuluh
6. Pelaksanaan demplot yang diikuti oleh adopsi teknologi anjuran oleh petani
7. Jumlah penyuluh yang melakukan evaluasi kinerja
8. Jumlah kelembagaan petani yang melakukan jejaring dan
9. Peranan kemitraan.

2.3 Penyuluhan Pertanian

Menurut Jones dalam Swanson (1996), Penggunaan kata "*extension*" berasal dari perkembangan pendidikan di Inggris selama paruh kedua abad ke 19. Sekitar tahun 1850, diskusi dimulai di dua universitas kuno Oxford dan Cambridge tentang bagaimana mereka dapat melayani kebutuhan pendidikan di dekat rumah mereka, dari populasi yang berkembang pesat di kawasan industri perkotaan. Baru pada tahun 1867, suatu upaya praktis pertama dibuat dalam apa yang disebut "perpanjangan universitas," tetapi kegiatan itu berkembang dengan cepat untuk menjadi gerakan yang mapan sebelum akhir abad ini. Awalnya, sebagian besar ceramah yang diberikan adalah tentang topik sastra dan sosial, tetapi pada tahun 1890-an, subjek pertanian ditutupi oleh dosen yang bergerak di daerah pedesaan.

Penyuluhan pertanian pada dasarnya adalah suatu proses komunikasi teknologi atau proses difusi inovasi yang berawal dari lembaga-lembaga penelitian dan pada akhirnya diterapkan oleh petani dan keluarganya. Dalam proses difusi ada tiga hal yang mungkin terjadi pada diri petani sebagai sasaran, yaitu (1) mereka bersikap tidak peduli (mengabaikan inovasi yang disampaikan), (2) mencari informasi lebih lanjut terhadap inovasi yang disampaikan dan (3) melakukan apa yang ditawarkan (menerapkan inovasi tersebut).

2.3.1 Peranan Penyuluhan Pertanian

Agen penyuluhan pertanian adalah membantu petani membentuk pendapat yang sehat dan membuat keputusan yang baik dengan cara berkomunikasi dan memberikan informasi yang mereka perlukan. Pendapat petani dan keputusannya berdasarkan kepada citra mereka tentang kenyataan hidup dan dugaan mereka terhadap konsekuensi tindakannya. Namun, dugaan itu tidaklah selalu benar, karena bayangan tentang sesuatu kenyataan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan itu sendiri. Karenanya, penyuluh pertanian bertugas membantu petani untuk menghadapi kenyataan ini. Ini memberi mereka pengalaman, karena dari tindakan mereka kemudian diperoleh konsekuensi sesuai yang diharapkan. Dengan seringnya mencapai konsekuensi yang diharapkan, petani menjadi lebih baik, terhadap penyesuaian dirinya di dalam kehidupan. Peranan utama penyuluhan di beberapa negara pada masa lalu dipandang sebagai ahli teknologi dari peneliti ke petani. Sekarang, peranan penyuluhan lebih dipandang sebagai proses membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka, dan dengan cara menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan itu, petani mendapatkan informasi tidak hanya dari agen pertanian penyuluhan, tetapi juga dari beberapa sumber lain, termasuk pengalaman mereka sendiri serta pengalaman mitra mereka untuk mengembangkan wawasan (A.W. Van den Ban dan H.S Hawkins, 1999).

Sesuai dengan kondisi masyarakat petani saat ini dan kondisi lingkungannya, pada mulanya peranan penyuluhan diutamakan pada kewajiban menyampaikan inovasi dan mempengaruhi sasaran penyuluhan melalui metode dan teknik tertentu sehingga-mereka sadar dan mampu mengadopsi inovasi yang disampaikan.

Namun, sesuai dengan perubahan kondisi, maka peranan penyuluhan pertanian mengalami pergeseran. Adapun peranan penyuluhan sebagai berikut: menjadi penyampai inovasi, mempengaruhi keputusan sasaran, menjadi jembatan penghubung pemerintah dan lembaga penyuluhan dengan petani, serta menggerakkan masyarakat untuk mau berubah.

Penyuluhan berperan dalam peningkatan pengetahuan petani akan teknologi maupun informasi-informasi pertanian yang baru. Peranan penyuluhan dalam memberikan pengetahuan kepada para petani dapat berfungsi sebagai proses penyebarluasan informasi kepada para petani, sebagai proses penerangan atau memberikan penjelasan, sebagai proses perubahan perilaku petani (sikap, pengetahuan dan keterampilan), dan sebagai proses pendidikan. Kegiatan penyuluhan diartikan dengan berbagai pemahaman yaitu seperti penyebaran informasi, penerangan, pendidikan non formal, perubahan perilaku (perilaku, individu, nilai-nilai, hubungan antar individu, kelembagaan), pemberdayaan masyarakat serta penguatan komunitas, Mardikanto (2009).

2.3.2 Metode Penyuluhan Pertanian

Dari pengertian metode penyuluhan terlihat adanya kaitan antara tujuan dan sasaran, materi yang akan disuluhkan perlu untuk direncanakan dengan baik. Hal ini dilakukan karena dalam metode penyuluhan diharapkan agar tujuan dapat tercapai dengan baik, dan karena itulah maka diperlukan suatu perencanaan tujuan yang disesuaikan dengan masalah yang akan dihadapi oleh petani, tingkat pengetahuan dan tingkat keterampilan yang dimiliki dan waktu serta tempat di mana penyuluhan akan dilaksanakan. Dengan demikian akan nampak bahwa metode penyuluhan benar - benar merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penyuluhan (Usman, 1998).

Suatu usaha yang dilakukan untuk memulai perubahan kondisi yang dialami oleh masyarakat petani diperlukan suatu metode yang bersifat khusus. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan kemampuan petani, agar kondisi sosial dan kepercayaan petani terhadap dirinya bisa meningkat. Dengan kata lain bahwa metode penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem yang terkait dengan pencapaian suatu tujuan (Usman, 1998).

2.3.3 Jenis-jenis Metode Penyuluhan.

Metode penyuluhan berdasarkan dari segi pendekatan terbagi atas tiga yaitu pendekatan individu pendekatan massal, dan pendekatan kelompok (Usman, 1998).

1. Metode Penyuluhan Berdasarkan Pendekatan Individu

Metode pendekatan individu merupakan pendekatan penyuluhan pertanian berdasarkan perorangan. Metode ini dapat dilakukan dengan jalan :

a. Kunjungan rumah

Biasanya disebut dengan anjungsana ke rumah petani atau ke lahan usahatani petani yang bertujuan untuk menyampaikan informasi demi meningkatkan pengetahuan serta keterampilan petani (Usman, 1998)

b. Demonstrasi hasil

Kegiatan ini dilaksanakan pada lahan usahatani dalam satu musim tanam dengan menerapkan paket teknologi yang dianjurkan. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan petani yang menjadi objek (Usman, 1998)

c. Kontak Informal

Berupa kegiatan surat berkala dan via telepon. Merupakan kegiatan lanjutan guna untuk memecahkan masalah atau mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi oleh petani (Usman, 1998).

Metode pendekatan massal merupakan metode pendekatan penyuluhan dalam memberikan informasi karena sasaran yang dicapai jumlahnya besar. Metode ini dapat dilaksanakan melalui :

- a. Siaran televisi/radio
Dalam kegiatan ini sasarannya luas. Dapat menerima informasi guna menambah pengetahuan petani (Usman,1998).
 - b. Pameran atau pemutaran Film
Metode ini dilaksanakan guna untuk menumbuhkan minat serta kesadaran sasaran terhadap sesuatu inovasi baru. Selain beberapa cara tersebut di atas maka dalam metode pendekatan massal ini bisa juga dilakukan melalui pembuatan poster, buletin dan lain-lain (Usman, 1998)
2. Metode Penyuluhan Berdasarkan Pendekatan Kelompok
- Metode ini sangat efektif untuk menumbuhkan motivasi, pengembangan sikap dan menyampaikan informasi teknologi baru. Metode ini dapat dilaksanakan dengan jalan :
- a. Demonstrasi cara/hasil, metode ini bisa juga dilaksanakan dalam metode individu tergantung dari sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat. Kegiatan ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan (Usman,1998).
 - b. Pertemuan/diskusi
Kegiatan ini dapat dilaksanakan berupa diskusi kelompok, kursus tani. Metode digunakan untuk menyampaikan informasi teknologi baru (Usman, 1998)
 - c. Sekolah lapang/kursus
Kegiatan ini merupakan pendidikan non formal bagi petani yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengambil keputusan dan menerapkan teknologi pertanian terbaru. Kegiatan ini berupa diskusi kelompok, demonstrasi hasil serta memberikan pengetahuan akan teknologi pertanian terbaru melalui teori-teori yang diberikan oleh para penyuluh (Usman,1998)

2.4 Kesiapan Implementasi Program Kostratani (*E-Readiness*)

Kesiapan (*readiness*) menurut *business dictionary* diartikan sebagai “*State of preparedness of person, systems, or organizations to meet a situation and carry out a planned sequence of actions. Readiness is based on thoroughness of the planning, edaquacy and training of the personel, and supply and reserve of support service or systems*”²⁸, maksudnya ialah kesiapan merupakan pernyataan siap dari seseorang, sistem atau organisasi untuk memenuhi dan melaksanakan sebuah kegiatan yang terencana. Kesiapan ini berdasarkan pada ketelitian perencanaan, kemampuan sumber daya manusia, serta dukungan dari sistem.

E-Readiness menurut IBM ialah ukuran kualitas infrastruktur informasi dan komunikasi teknologi (ICT) suatu negara dan kemampuan para konsumen, bisnis dan pemerintah untuk menggunakan ICT dimaknai sebagai sebuah tolak ukur atau derajat suatu masyarakat yang dinyatakan siap dalam memperoleh manfaat dari teknologi informasi. Sedangkan Vaati mendefenisikan *E-Readiness* sebagai kemampuan sebuah institusi untuk memanfaatkan jaringan komputer dan internet sebagai sebuah mesin yang berguna untuk mengakses dan berbagi material elektronik. Lebih lanjut Bowles mengartikan *E-Readiness* sebagai gambaran

tentang kapasitas seseorang atau kelompok untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai hasil yang bermanfaat.

BPP yang menerapkan teknologi informasi tentu saja membutuhkan kesiapan yang matang, *E-Readiness* di BPP dapat diartikan sebagai kesiapan lembaga BPP secara keseluruhan untuk memanfaatkan teknologi informasi guna memberikan layanan kepada pemustaka serta membantu proses terselenggaranya BPP agar berjalan dengan maksimal.

Penilaian *E-Readiness* jika diterapkan pada sebuah proses evaluasi merupakan langkah awal menuju perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelaksanaan perencanaan yang berakhir pada perubahan kehidupan manusia secara nyata. *E-Readiness* sangat berarti dan efektif sebagai patokan perbandingan dan panduan usaha pengembangan dalam merencanakan masa depan dengan memahami kondisi terkini. Dengan demikian, merupakan salah satu alat penting dalam menilai dampak teknologi informasi dan komunikasi untuk menggantikan pendapat dan mitos yang buruk mengenai peran teknologi informasi dalam pengembangannya.

1. Instrumen Penilaian E-Readiness

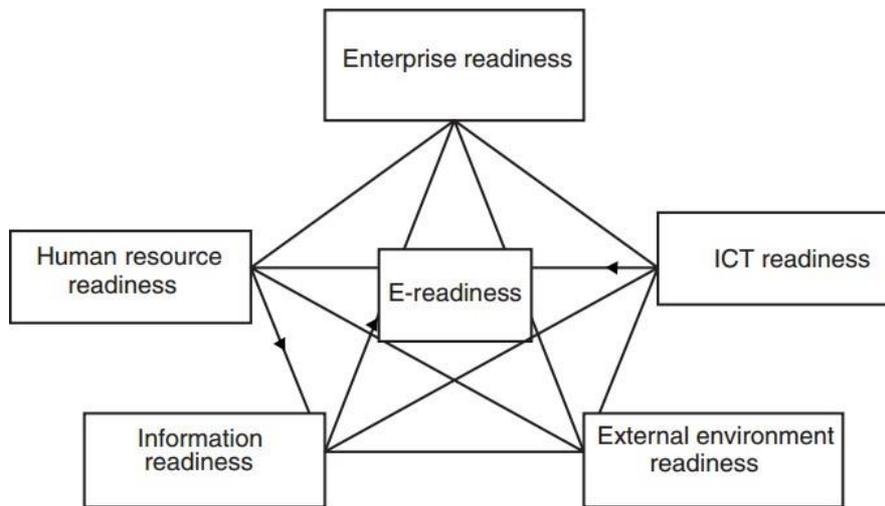
Model penilaian E-Readiness pertama kali dikembangkan oleh CSSP (Computer Systems Policy Project) pada tahun 1998 dan menjadi alat ukur E-Readiness pertama yang kemudian diberi nama Readiness Guide for Living in the Networked World. Metode penilaian ini dapat menjelaskan kesiapan masyarakat dalam penerapan teknologi informasi termasuk di sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, bisnis, fasilitas kesehatan juga di lingkungan perumahan. Sejalan dengan pertumbuhan teknologi yang begitu pesat, instrument pengukuran kesiapan implementasi teknologi inipun kian bertambah, beberapa peneliti dari berbagai organisasi mulai mengembangkan E-Readiness tool untuk mengukur kesiapan dalam berbagai sektor, di antara organisasi tersebut ialah: CID (Centre for International Development) Universitas Harvard, MI (McConnel International), UNCTAD (the United Nations Development Program), dsb. Dari sekian banyak tools yang dikembangkan, di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Ready? Net.Go, yakni sebuah alat ukur penilaian E-Readiness yang dikembangkan oleh McConnel International, tool ini berfungsi untuk mengukur kesiapan sebuah negara dalam menerapkan E-Government dan E-Business dengan mengukur lima atribut yang saling berhubungan dengan sub-indikatornya, yakni: Connectivity, E-Leadership, Information Security, Human Capital dan E-Business.
- b. Technological Achievement Index, Instrumen menpenilaian E-Readiness yang dikembangkan oleh Desai dkk pada tahun 2002 ini digunakan oleh UNDP (United Nation Development Program) dan merupakan indeks gabungan dari pencapaian yang mencerminkan tingkat kemajuan teknologi serta kesiapan suatu negara dalam menghadapi era modern. Instrumen ini menggunakan 4 indikator yang dibagi kedalam dua sub-indikator, yakni: a) Creation of technology (indikator ini dinilai berdasarkan tingkat paten yang didaftarkan oleh warga negara dari instansi resmi di negara tersebut dan penerimaan upah royalti serta lisensinya), (b) Diffusion of newest technologies (dinilai berdasarkan seberapa baik pelayanan internet serta ekspor teknologi, (c) Diffusion of oldest technologies (diukur dari penggunaan

- telepon serta konsumsi listrik), (d) Human skills (berdasarkan tingkat pendidikan serta pelatihan).
- c. Readiness for the Networked World, tool ini dikembangkan oleh CID (Centre for International Development) Harvard, berfungsi untuk mengukur tingkat kesiapan implementasi teknologi informasi di Negara berkembang, tool ini membagi kesiapan tersebut kedalam 5 indikator yakni: Networked access, networked learning, networked society, networked economy, dan network policy
 - d. An Integration Information Rich E-Readiness Assessment Tool, instrument penilaian ini dirancang oleh Stephen Muta dan Peter van Brakel yang merupakan pengembangan dari disertasi dari Universitas Johannesburg Afrika Selatan berjudul An evaluation of e-readiness assessment tools with respect to information access. Mutula dan Brakel kemudian menambahkan beberapa indikator serta mempelajari beberapa tool lain kemudian memasukkan indikator-indikator baru yang kemudian didapatilah tool baru yang kemudian diberi nama An Integration Information Rich E-Readiness Assessment Tool, tool ini berfungsi untuk mengukur kesiapan dalam penerapan ICT yang menekankan pada akses informasi. Serta menambahkan indikator lain seperti kesiapan lembaga, infrastruktur ICT, sumberdaya manusia, serta faktor kesiapan eksternal.

2. Model Mutula dan Brakel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model yang dikembangkan oleh Mutula dan Brakel pada tahun 2006. Model penilaian ini bernama An Integration Information Rich E-Readiness Assessment Tool dan merupakan hasil pengembangan dari beberapa konsep model-model penelitian E-Readiness seperti CSPP (Computer System Policy Project), CID Harvard (Centre of International Development), EIU (Economist Intelligence Unit, dan IBM Program. Kemudian, Mutula dan Brakel menambahkan beberapa komponen indikator akses informasi pada dalam model yang dirancangnya. Model penilaian E-Readiness yang dikembangkan oleh Mutula dan Brakel ini dipilih karena model ini dikembangkan untuk menilai kesiapan suatu lembaga dalam hal akses informasi, dan dari sekian banyak model penilaian, model ini adalah yang paling tepat untuk diterapkan dalam penilaian E-Readiness di BPP. Terdapat 5 segmen kesiapan yang kemudian dibagi menjadi 112 komponen. 5 komponen tersebut yakni: Kesiapan Informasi (Information Readiness), Kesiapan Lembaga (Enterprise Readiness), Kesiapan Sumber Daya Manusia (Human Resources Readiness), Kesiapan Infrastruktur (ICTReadiness), dan Kesiapan Lingkungan Eksternal (External Environment Readiness). Penjabarannya sebagai berikut.



Gambar 1-1 Model Penilaian *E-Readiness* Mutula dan Brakel

3. Adaptasi Model Mutula dan Brakel

Penelitian yang dikembangkan Mutula dan Brakel (2006) adalah model yang digunakan untuk menilai kesiapan dalam hal akses informasi di suatu lembaga atau perusahaan. BPP merupakan lembaga penyedia serta pengelola informasi yang bertugas melayani penggunaannya dalam hal akses informasi. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model dari Mutula dan Brakel karena kesamaan dalam hal akses informasi. Model Mutula dan Brakel, seperti yang dijabarkan sebelumnya, mengandung 5 segmen kesiapan yang terbagi menjadi 112 komponen penilaian, tetapi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 59 komponen penilaian. Komponen-komponen dalam model tersebut akan digunakan sebagai indikator untuk menilai kesiapan implementasi teknologi dengan menyesuaikan kondisi yang ada di BPP. Kebanyakan indikator yang tidak digunakan adalah karena indikator tersebut lebih sesuai digunakan dalam menilai kesiapan lembaga yang bersifat profit. Hal ini tidak sesuai dengan BPP yang bersifat non-profit. Disamping itu, terdapat juga beberapa indikator yang hampir mirip dengan indikator lain sehingga untuk menghindari pertanyaan ganda maka indikator tersebut tidak digunakan.

2.5 Agriculture War Room

Kementerian Pertanian merilis Agriculture War Room (AWR) atau ruangan berisi sejumlah alat pemantau yang berfungsi memperbarui data pertanian di Indonesia secara berkala. Data yang dihasilkan oleh sistem di ruangan ini meliputi luas lahan baku sawah, pasokan pupuk, hingga luas panen.

Dalam pembangunan ruangan AWR, Kementerian Pertanian telah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya. Di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Pusat Statistik, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Adapun ruangan ini dilengkapi oleh citra satelit yang dapat merekam pelbagai objek, seperti luas lahan. Melalui teknologi yang disematkan dalam ruangan AWR ini, kementerian dapat mendata efektivitas dalam menghasilkan produk-produk pertanian. Ruangan AWR sebagai ruang kontrol yang mirip dengan The Pentagon, markas

Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan saat ini pemerintah memang perlu memperbaiki sejumlah data lahan, termasuk lahan pertanian. Ia mencontohkan data terkait data luas lahan baku sawah 2018. Menurut dia, sesuai dengan temuan di lapangan, data lawas itu perlu diperbarui. Sofyan menyatakan, kementerianya baru-baru ini telah melakukan verifikasi data luas lahan baku sawah berdasarkan pendekatan-pendekatan spasial.

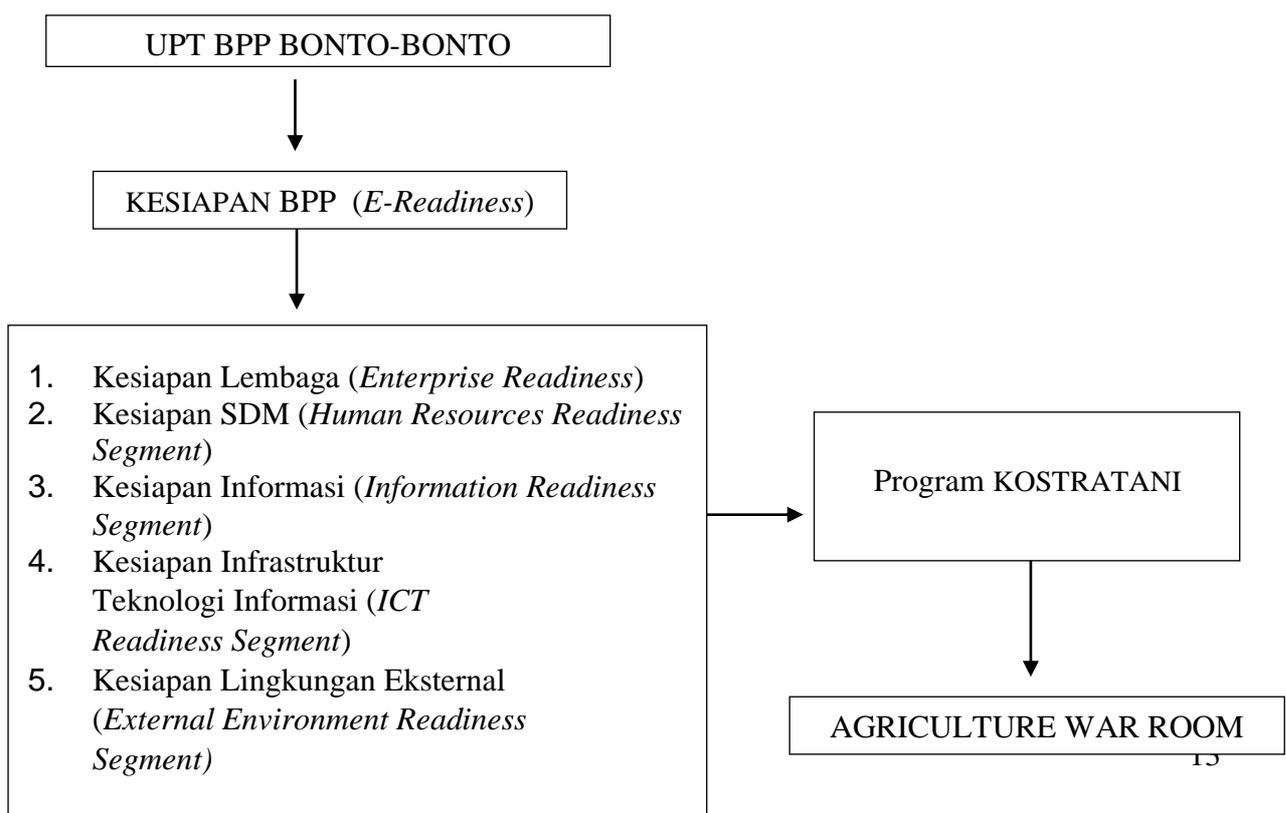
Dari hasil verifikasi lahan baku pertanian oleh tim lima kementerian dan lembaga, Sofyan mengatakan telah diperoleh luasan lahan baku sawah terkini, yakni 7,46 juta hektare. "Dibandingkan data 2018, terjadi penambahan seluas 385 hektare.

Data itu kemudian dituangkan dalam berita acara dan diteken oleh semua pihak yang ikut serta dalam pembaruan data. Menurut Sofyan, data tersebut rilis pada 9 Desember 2019. Sementara itu, dibandingkan pada 2013, terjadi pengurangan sebesar 287 hektare akibat konversi. "Lalu ada penambahan-penambahan lain sehingga netnya dibandingkan dengan 2019 berkurang menjadi 287 ribu hektare.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Membangun kerangka teoritis dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena atau kejadian atau perilaku. Kementerian Pertanian mencanangkan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan (Kostratani) sebagai gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi. Kementerian dengan motto Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern ini menggulirkan Kostratan untuk menjamin terwujudnya sinergi dan kesatuan gerak pembangunan pertanian di setiap ini. Dengan demikian, gerak pembangunan pertanian pada setiap tingkatan pemerintahan dapat berlangsung harmonis.

Adapun skema kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1-2 Skema Kerangka Pemikiran Analisis Kesiapan BPP Dalam Mewujudkan Program Komando Strategis Pertanian (Kostratani) Studi Kasus UPT BPP Pertanian Wilayah Bonto Bonto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat untuk melaksanakan pelayanan informasi yang baik maka seluruh komponen di BPP harus memiliki kesiapan yang matang, baik dari pegawai yang memiliki kompetensi yang profesional dan berkualitas untuk menjalankan pekerjaannya, serta infrastruktur pendukung guna mempermudah pemenuhan kebutuhan informasi bagi petani. Upaya-upaya tersebut adalah dalam rangka memperbaiki Kelembagaan BPP sebagai khazanah karya manusia, sumber informasi, rekreasi, pendidikan, budaya, penelitian serta pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan petani.

Hadirnya infrastruktur teknologi informasi di BPP menuntut kesiapan dari lembaga informasi tersebut untuk menerapkan teknologi informasi, kesiapan ini disebut dengan istilah E-Readiness, istilah ini diartikan sebagai kemampuan dari suatu departemen, organisasi atau workgroup untuk berhasil mengadopsi, menggunakan dan memperoleh manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengetahui kesiapan tersebut maka perlu dilakukan penilaian kesiapan dalam implementasi teknologi informasi (E-Readiness) di BPP yang hasilnya nanti dapat menentukan seberapa besar kesiapan suatu BPP dalam mewujudkan Program Kostrani. Di samping itu, pengukuran E-Readiness dapat memberikan petunjuk yang dapat membimbing pengambil kebijakan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan pengembangan pelayanannya.

Guna mengukur kesiapan tersebut penulis menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Mutula dan Brakel. Mutula dan Brakel kemudian menambahkan beberapa indikator serta komponen baru agar dapat menilai kesiapan suatu lembaga. Dari 112 komponen penilaian kemudian disesuaikan dengan keadaan BPP di lokasi penelitian dengan menghubungkan segmen dan komponen penilaian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kesiapan Lembaga (*Enterprise Readiness*), Kesiapan SDM (*Human Resources Readiness Segment*), Kesiapan Informasi (*Information Readiness Segment*), Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi (*ICT Readiness Segment*), Kesiapan Lingkungan Eksternal (*External Environment Readiness Segment*).

Perkembangan di lapangan dapat dimonitor dan diarahkan pusat melalui Agriculture War Room (AWR). Sebagai ujung tombak di tingkat lapangan diperankan oleh Kostratani yang berkedudukan di kecamatan. Melalui Kostratani, pemerintah mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Sarana dan prasarananya juga ditingkatkan. Kapasitas penyuluh dan kelembagaan penyuluhan serta, kelembagaan petani ditingkatkan dan diperkuat.

Di tingkat nasional, Menteri Pertanian memainkan peranannya memantau dan mengendalikan semua kegiatan pembangunan pertanian di daerah melalui peran digital dari daerah yang tersambung dengan AWR. AWR menjadi jembatan informasi bagi pengambil kebijakan dengan petani dan penyuluh di lapangan. Selain itu, AWR juga menjadi pusat kendali dan pemantauan secara real time kondisi pertanaman dan potensi pertanian di seluruh wilayah Indonesia.